

ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA TAHUN 2011–2015

Ardiyana Primawaty
Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Email: ardiyana2009@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se- Sumatera tahun 2011-2015 sesuai dengan tipe pemerintahannya, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Kondisi keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan mengaplikasikan konsep enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Keenam dimensi tersebut terdiri atas solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, solvabilitas pelayanan, dan kemandirian keuangan. Pada tahun 2015, analisis dikembangkan dengan mengaplikasikan dimensi solvabilitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahannya berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya masih termasuk dalam kategori kurang baik.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Pemerintah Daerah, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Pelayanan, Solvabilitas Operasional.

PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah strategis bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan cara memperkuat basis perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kemandirian wilayah. Upaya pemerintah ini untuk mewujudkan reformasi kebijakan dalam bidang otonomi daerah yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola otonomi yang lebih baik.

Konsekuensi dari undang-undang pemerintahan daerah tersebut adalah pada lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi fiskal yang berlaku dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas desentralisasi termasuk di dalamnya kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan ini terealisasi melalui mekanisme penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang diwujudkan sebagai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sebagai implementasi desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Hal ini dipengaruhi pula oleh kondisi keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Kondisi keuangan

pemerintahan daerah menjadi cermin dari kualitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting yang kemudian menjadi permasalahan terkait desentralisasi fiskal karena pemerintah pusat hanya menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tanpa ada aturan terperinci mengenai pengelolaannya (Ritonga dkk, 2012a). Kondisi ini bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah (Dewi, 2015) sehingga membuat kondisi keuangan tiap pemerintah daerah juga bervariasi. Masing-masing pemerintah daerah pun belum memiliki mekanisme formal untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan finansialnya sendiri secara riil.

Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah terindikasi dari kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya baik secara likuiditas, solvabilitas dan layanan. Kondisi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk hutang ataupun pemenuhan pelayanan secara tepat waktu (Wang dkk., 2007). Ritonga dkk (2012) menyatakan bahwa sebuah kondisi keuangan yang baik akan menjamin keberlanjutan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan kepada warganya dan sekaligus memainkan peran penting dalam perekonomian. Wang dkk. (2007) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan yang baik sangat penting dalam

melaksanakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Kondisi keuangan mengarah pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban meliputi enam dimensi yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, 2) solvabilitas anggaran yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional, 3) solvabilitas jangka panjang yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, 4) fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan untuk mengatasi kejadian tak terduga di masa depan, 5) kemandirian keuangan yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien, 6) solvabilitas layanan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Ritonga 2014).

Penelitian terdahulu yang melakukan analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Dewi (2015) yang menganalisis keuangan pemerintah daerah se-Jawa Bali tahun 2010 s.d. 2013 menggunakan model *10-point test* Brown dengan pengklasteran yang dibangun oleh Priyambodo (2014). Penelitian ini menggunakan instrumen analisis yang sebatas pada laporan Realisasi anggaran (LRA) saja serta belum mempertimbangkan indikator opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian Natrini (2016) dilaksanakan dengan menggunakan rasio kondisi keuangan yang telah dimodifikasi atas model Brown (1993). Penelitian ini menggunakan teknik klaster yang dikembangkan oleh Baidori (2015) untuk menghasilkan perbandingan kondisi keuangan yang seimbang

antara pemerintah kota dan kabupaten menggunakan delapan variabel komponen perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini telah dapat memetakan kondisi keuangan pemerintah daerah di kawasan Jawa Bali namun dengan keterbatasan bahwa penelitian baru menganalisis laporan keuangan pemerintahan daerah kawasan tersebut dalam kurun waktu dua tahun saja. Sebagai upaya mendapatkan analisis secara lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, maka diperlukan jangkauan yang lebih luas dari aspek kuantitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indonesia yang lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di kawasan Sumatera dengan kurun waktu lima tahun anggaran yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan mengingat di kawasan Sumatera terdapat penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari sepuluh provinsi, seratus dua puluh kabupaten, dan tiga puluh empat kota. Dengan komposisi sejumlah tersebut, maka diperlukan pemantauan yang efektif bagi kondisi keuangan pemerintah daerah di kawasan tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan pada deskripsi atas kondisi keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio dengan pendekatan beberapa metode kualitatif untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di kawasan Sumatera dengan mengaplikasikan model 6 dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Model ini dipilih karena menggunakan dimensi dan indikator yang lebih komprehensif untuk

menangkap aspek kondisi keuangan pemerintah daerah karena dalam pengukurannya didasarkan pada ketersediaan informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia (Ritonga, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kondisi Keuangan Daerah

1. Definisi Kondisi Keuangan

Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa definisi yang berusaha untuk menjelaskan istilah kondisi keuangan pemerintah daerah, namun pengertian kondisi keuangan daerah yang relevan dengan ilmu akuntansi adalah kemampuan pemerintah daerah untuk secara konsisten melakukan hal berikut: membayar tagihan saat ini, menyeimbangkan anggaran tahunan, memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang, dan memenuhi persyaratan tingkat layanan saat ini dan masa depan. Sebagaimana terangkum dalam berbagai literatur yang mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah mengacu pada aspek-aspek kondisi keuangan, relatif konsisten, sebagai solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan layanan tingkat solvabilitas, masing-masing (Honadle, Costa, & Sigler, 2004; Maher & Nollenberger, 2009; Wang, 2007).

The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 1997) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah sebagai kesehatan kesehatan keuangan, yang diukur dari aspek-aspek keberlanjutan (*sustainability*), kerentanan (*vulnerability*) dan fleksibilitas (*flexibility*) dalam konteks keseluruhan dari lingkungan ekonomi maupun

keuangan. Keberlanjutan keuangan merupakan kondisi di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mempertahankan program yang telah ada dan memenuhi kewajiban terhadap kreditor tanpa menambah beban hutang terhadap perekonomiannya. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau meningkatkan kapasitas utang. Kerentanan keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah menjadi tergantung, sehingga kerentanan, sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruh, dari sumber-sumber domestik dan internasional.

Beberapa istilah untuk mengemukakan konsep yang sama telah digunakan, seperti kesehatan fiskal, stres fiskal, ketegangan fiskal, kesulitan fiskal, posisi fiskal dan stabilitas fiskal. Demikian pula, kata fiskal sering dipertukarkan dengan keuangan. Dari setiap studi yang memberikan definisi operasional yang unik untuk istilah-istilah ini, tetap berada dalam gradasi satu konsep yakni kondisi keuangan (Ramsey, 2013), serta konsep bahwa kesehatan fiskal merupakan penentu utama atas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Crosby & Robin 2013).

Kondisi keuangan pemerintah daerah sebaiknya diturunkan dari tujuan nasional karena kondisi keuangan pemerintah daerah adalah efek keuangan yang diakibatkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan Negara (Ritonga, 2014). Tujuan bernegara bagi Indonesia adalah sebagaimana yang

termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan membentuk suatu tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengejawantahan tujuan Negara tersebut dapat terlihat salah satunya melalui pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya diberikan hak otonomi untuk merancang kebijakan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap program dan kegiatan yang bervariasi karena dirancang berdasarkan persepsi *stakeholder*. Pada akhirnya situasi ini akan berdampak pula pada kondisi keuangan yang tidak sama antara pemerintah daerah yang satu dan lainnya, meskipun mereka berada dalam satu kawasan wilayah. Kondisi keuangan suatu pemerintah daerah dikatakan sehat apabila pemerintah daerah mampu menjalankan hak-hak keuangannya (yaitu pengumpulan pendapatan) secara efisien dan efektif

dan mampu memenuhi semua kewajiban keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara (Ritonga, 2014).

2. Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi kondisi keuangan pemerintah daerah yang paling banyak diterima adalah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan kemampuan untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Ritonga, 2014 p.102). Lebih lanjut, Ritonga dkk (2012a) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah kedalam enam dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan.

Proses konseptualisasi definisi kondisi keuangan pemerintah daerah dapat kita ilustrasikan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber : Ritonga (2014)

Pengukuran dan Indikator dalam Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikonsepsi oleh Ritonga (2014). Dalam model ini terdapat enam dimensi yang membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah. Dimensi tersebut adalah:

1. Solvabilitas jangka pendek yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Solvabilitas anggaran yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional.
3. Solvabilitas jangka panjang yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.
4. Fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan untuk mengatasi kejadian tidak terduga.
5. Kemandirian keuangan yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien.
6. Solvabilitas layanan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Alasan penggunaan model yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) tersebut adalah pertama, menggunakan dimensi dan indikator yang lebih komprehensif untuk menangkap aspek kondisi keuangan pemerintah daerah; kedua, rasio-rasio yang dikembangkan untuk mengukur masing-masing dimensi didasarkan pada ketersediaan informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh

pemerintah daerah di Indonesia yang dalam penyusunannya berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Penggunaan model dimaksud, karena telah memenuhi kriteria sebagai syarat instrumen yang baik yaitu andal (konsisten), valid (jelas), dan praktis sebagaimana dinyatakan oleh Cooper dan Schindler (2011); dan Sekaran dan Bougie (2010); (dalam Ritonga, 2014).

Kriteria *face validity* telah dipenuhi karena pengembangan model dimulai dari definisi kondisi keuangan. Uji korelasi yang dilakukan untuk menganalisis keandalan model terkait pembentukan masing-masing dimensi yang berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan tersebut adalah melalui uji korelasi Person. Uji tersebut memberikan hasil bahwa seluruh indikator pada tiap-tiap dimensi memiliki hubungan signifikan ($p < 0,01$). Sementara pengujian konsistensi internal atas model ini dilakukan dengan menggunakan *the standar cronbach* yang hasilnya menunjukkan bahwa *the cronbach coefficient alpha* adalah 0.84304. Hasil tersebut menyatakan bahwa model memiliki konsistensi internal yang baik antarindikator dalam tiap dimensi (lebih dari 0,7).

Validitas model ini juga diuji dengan melihat korelasinya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Hasil pengujian yang terlihat dari *pearson coefficient of correlation* $< 0,05$ menunjukkan bahwa semua faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi memiliki korelasi yang signifikan

dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Hasil ini membuat model telah memenuhi validitas prediktif. Model yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) ini juga telah memenuhi validitas konvergen, di mana terdapat korelasi yang signifikan (*p-value* antara 0,000 sampai dengan kurang dari 0,005). Validitas tersebut ditunjukkan dalam pergerakan nilai perhitungan akhir yakni indeks komposit yang sejalan dengan hasil model lain dari Kloha (2005) dalam perspektif *financial distress*. Selain itu model dari Ritonga (2014) mempunyai kemampuan untuk membedakan objek-objek yang dianalisis dengan model yang lain sebagaimana dilakukan dalam uji validitas *konkruen*.

Berikut merupakan rasio-rasio pengukuran untuk menunjukkan dimensi pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis:

a. Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari (Nollenberger dkk. 2003). Dalam penelitian ini, jangka waktu yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Kewajiban pemerintah daerah yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang disajikan sebagai kewajiban lancar, sementara sumberdaya yang tersedia dan dimaksudkan untuk digunakan selama jangka waktu yang sama disajikan sebagai aset lancar dalam neraca (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dimensi solvabilitas keuangan

jangka pendek pemerintah daerah diperoleh melalui formula berikut ini.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Kas \& Setara Kas+Investasi Jk Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Kas \& Setara Kas+Investasi Jk Pendek+ Piutang}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut maka semakin banyak pula aktiva lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar sebuah pemerintah daerah.

b. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

Solvabilitas keuangan jangka panjang mengindikasikan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Nollenberger et al. 2003). Dimensi ini menunjukkan keberlanjutan pemerintah daerah, yang dicerminkan melalui total aset atau ekuitas dana investasi dibagi dengan jumlah kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dimensi solvabilitas keuangan jangka panjang pemerintah daerah diperoleh melalui formula berikut ini.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Kewajiban}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Ekuitas Dana Investasi}}{\text{Total Kewajiban}}$$

c. Solvabilitas Anggaran dan Solvabilitas Operasional

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasionalnya selama satu periode keuangan (Nollenberger dkk., 2003). Indikator dimensi ini ditunjukkan melalui keseimbangan antara pendapatan normal pemda dibagi dengan pengeluaran operasionalnya (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dimensi solvabilitas anggaran pemerintah daerah diperoleh melalui formula berikut ini.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Total Belanja-Belanja Modal}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Belanja Operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Belanja Pegawai}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Pendapatan LRA}}{\text{Total Belanja}}$$

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan untuk mendanai beban operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Solvabilitas operasional ini dihitung dengan menerapkan basis akrual. Indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasional selama satu periode. Indikator dimensi ini menunjukkan keseimbangan antara pendapatan usaha dan pengeluaran operasi selama periode fiskal. Solvabilitas operasional ini diukur dengan rasio sebagai berikut.

Solvabilitas Operasional

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total Beban}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Beban Operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Beban Pegawai LO}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Pendapatan LO}}{\text{Total Beban}}$$

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangkan dari total pendapatan karena pendapatan DAK bukan merupakan pendapatan yang bersifat rutin dan merupakan jenis pendapatan yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Pada rasio A belanja modal dikurangkan dari total belanja karena belanja modal bukan merupakan bagian dari kegiatan operasional pemda. Untuk rasio C dan G, belanja pegawai ditempatkan sebagai penyebut karena belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam postur belanja operasional pemerintah daerah. Semakin rendah nilai rasio-rasio tersebut menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

d. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya (CICA, 1997). Dimensi ini dicerminkan melalui rasio-rasio besarnya pendapatan asli pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan atau total belanja (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dimensi

kemandirian keuangan pemerintah daerah diperoleh melalui formula berikut ini.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}}{\text{Total Pendapatan LO}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}}{\text{Total Beban LO}}$$

Pendapatan asli pemerintah daerah merupakan semua pendapatan yang bersumber dari daerah dan di bawah kendali pemerintah daerah. Ketika rasionya semakin rendah maka hal ini menunjukkan kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah itu. Pemerintah daerah yang menghasilkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan mampu mendukung kapasitas pembangunan sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio PAD yang semakin besar terhadap pendapatan atau belanja menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan pusat/provinsi.

e. **Fleksibilitas Keuangan**

Fleksibilitas keuangan pemerintah daerah merupakan kondisi saat pemerintah daerah dapat meningkatkan sumberdaya keuangannya untuk menghadapi

peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (CICA, 1997). Indikator-indikator dalam dimensi ini diwakili oleh kapasitas pendapatan pemerintah daerah setelah dikurangi belanja wajib dan/atau pendapatan terikat yang selanjutnya dibagi dengan besarnya jumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dimensi fleksibilitas keuangan pemerintah daerah diperoleh melalui formula berikut ini.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK LRA} - \text{Belanja Pegawai})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK LRA})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO} - \text{Belanja Pegawai LO})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Beban Pegawai LO})}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Beban Pegawai})}$$

Tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah yang tinggi dalam menghadapi kejadian luar biasa yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah ditunjukkan dengan rasio yang semakin tinggi.

f. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan merupakan dimensi yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat (Wang et al, 2007). Dimensi ini terwakili dalam rasio antara sumberdaya fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah dengan jumlah warga yang dilayani oleh pemerintah daerah (Ritonga, 2014). Rasio-rasio dalam dimensi ini menunjukkan berapa biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melayani setiap warga. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin tidak efisiennya pemerintah daerah dalam memberikan layanan. Rasio-rasio dimensi solvabilitas layanan diperoleh melalui formula berikut ini.

Rasio A = Total Ekuitas / Jumlah Penduduk

Rasio B = Total Aset / Jumlah Penduduk

Rasio C = Total Aset tetap / Jumlah Penduduk

Rasio D = Total Belanja LRA / Jumlah Penduduk

Rasio E = Total Belanja Modal Tetap LRA / Jumlah Penduduk

Rasio F = Total Beban LO / Jumlah Penduduk

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah dengan indikator yang komprehensif.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang sejalan dengan pandangan Crosswell (2014) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Creswell (2014) bahwa selama proses penelitian peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif berupa dokumen public (seperti koran, artikel, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, surat, email).

Data untuk penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa dokumen publik. Dokumen tersebut terdiri atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota selama kurun waktu Tahun Anggaran 2011-2015 se-Sumatera yang telah diperiksa oleh BPK RI dan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Regional Sumatera, di antaranya berupa data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, usia produktif dan Produk Domestik Regional Bruto.

Analisis penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan Ritonga (2014) dengan langkah sebagai berikut: *Tahap 1*. Menentukan kelompok acuan (*benchmark*) pemerintah daerah yang setara.

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk meningkatkan *fairness* dan daya banding antar pemerintah daerah karena besaran indeks akan menunjukkan kondisi keuangan relative antar pemerintah daerah yang setara (Ritonga, 2014).

Tahap 2. Menghitung indeks indikator dan indeks dimensi.

a. Menghitung Indeks Indikator, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai min})}{(\text{nilai maks} - \text{nilai min})}$$

Nilai minimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Nilai maksimum adalah nilai terendah dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Indeks indicator akan memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 0. Nilai-nilai minimum dan maksimum ini ditentukan setiap tahun (Ritonga, 2014).

b. Menghitung Indeks Dimensi, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi} = (I \text{ indicator-1} + I \text{ indicator-2} + \dots + I \text{ indicator-n}) : n$$

I = indeks indicator; n = jumlah indikator yang membentuk dimensi

Tahap 3. Menghitung indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah. Indeks komposit kondisi keuangan adalah rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang membentuknya. Indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah dapat diketahui melalui formula berikut:

$$\text{FCI} = w_1 * \text{DI}_1 + w_2 * \text{DI}_2 + \dots + w_n * \text{DI}_n$$

FCI = Indeks kondisi keuangan; w = bobot indeks dimensi; DI = indeks dimensi; n = jumlah dimensi.

Dalam menghitung Indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah sebagaimana formula tersebut digunakan teknik *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan bobot dari seluruh indeks dimensi. Adapun bobot untuk masing-masing indeks dimensi sebagai berikut :

Nama Dimensi	Bobot
Solvabilitas jangka pendek	0,206
Solvabilitas anggaran	0,142
Solvabilitas jangka panjang	0,245
Solvabilitas layanan	0,107
Fleksibilitas layanan	0,175
Kemandirian keuangan	0,125
Total Bobot	1,000

Formulasi tersebut di atas mengalami perubahan pada tahun 2015 pada saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang semula berbasis kas menuju akrual, menjadi berbasis akrual.

Perubahan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Operasional pada laporan keuangannya. Kondisi ini membuat dimensi penyusun kondisi keuangan daerah bertambah satu, yakni dimensi solvabilitas operasional.

Alasan kepraktisan untuk mengakomodir pembobotan bagi ketujuh dimensi tersebut melatarbelakangi asumsi bahwa masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama.

Asumsi ini diaplikasikan untuk menghitung indeks kondisi keuangan pemerintah daerah pada tahun 2015, sehingga indeks kondisi keuangan merupakan hasil total indeks dimensi dibagi dengan jumlah dimensi yang

membentuk kondisi keuangan. Formula perhitungan indeks komposit keuangan pemerintah daerah untuk 2015 adalah sebagai berikut.

$$FCI = \frac{\Sigma DI}{n}$$

FCI= Indeks kondisi keuangan; ΣDI =total indeks dimensi; n=jumlah dimensi

Tahap 4. Pemingkatan dan Pengkatagorian Kondisi Keuangan
Setelah diketahui hasil akhir indeks komposit kondisi keuangan, akan dilakukan pemingkatan antarpemerintah daerah. Hal tersebut untuk menunjukkan kondisi keuangan relatif antarpemerintah daerah di kawasan Sumatera untuk periode tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015.

Selanjutnya, hasil dari pemingkatan kondisi keuangan akan dikategorikan menjadi “Baik”, “Cukup”, dan “Buruk”, dengan menggunakan karakteristik distribusi normal. Kondisi keuangan disebut “Baik” jika hasil dari indeks komposit kondisi keuangan mempunyai nilai lebih besar (+) 1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Kondisi keuangan disebut “Cukup” jika hasil dari indeks komposit kondisi keuangan mempunyai nilai (-) 1 standar deviasi sampai dengan (+) 1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Sedangkan kondisi keuangan disebut “Buruk” jika hasil dari indeks komposit kondisi keuangan mempunyai nilai kurang dari (-) 1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan.

Indeks indikator, indeks dimensi, dan indeks komposit adalah hasil dari transformasi nilai variabel yang berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan nilai minimum dan nilai 1 menunjukkan nilai maksimum untuk setiap indeks. Setelah indeks masing-masing pemerintah daerah diketahui, maka berikutnya akan dibuat pemingkatan yang akan menginformasikan mengenai kondisi keuangan relatif antar pemerintah daerah (Ritonga, 2014).

Tahap 5. Deskripsi Kondisi Keuangan. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, dilakukan analisis kondisi keuangan yang lebih mendalam. Deskripsi akan dilakukan pada tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi keuangan terbaik dan tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi keuangan terburuk. Dalam mendeskripsikan kondisi keuangan, akan menggunakan teori permintaan dan penawaran yang dapat berlaku pada pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan Nollenberger (2003); Hyman (1990) dalam Ritonga (2014). Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi keuangan menurut Ritonga (2014), yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) profil umur masyarakat, (3) kemakmuran masyarakat, (4) kepadatan penduduk, (5) basis pendapatan pemerintah daerah, (6) efisiensi keuangan, (7) biaya barang dan jasa.

Validitas Data

Pengujian akurasi temuan untuk menyatakan validitas data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dinyatakan oleh

Creswell (2014) antara lain dengan *peer debriefing*, yaitu menggunakan rekan untuk membantu menelaah dan berdiskusi mengenai penelitian sehingga pemahaman dan interpretasi pihak lain atas hasil penelitian dapat selaras dengan peneliti.

Penelaahan dalam penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah data yang harus diproses mulai dari kegiatan input, kemudian diolah hingga saat dilakukan analisis. Penelaahan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi terjadinya kesalahan dalam rangkaian proses input maupun saat pengolahan data. Di sinilah pentingnya peranan *peer debriefer* dalam penelitian ini. Pihak yang akan menjadi *peer debriefer* adalah dosen pembimbing dan mahasiswa magister akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik khususnya yang melaksanakan penelitian pada ranah topic yang sama.

Pengujian atas keakuratan data juga dilakukan melalui *footing* dan *cross footing*. Teknik *footing* bertujuan untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Teknik *cross footing* dengan menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan (horizontal). Jika terdapat penjumlahan angka-angka di LHP tidak sama, maka data angka tetap menggunakan data sesuai sumber data tahun yang bersangkutan (*on face* LHP LKPD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data

Data yang akan dianalisis adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) tahun 2011-2015. Dari jumlah total 811 LHP LKPD di Sumatera tahun 2011 sampai dengan 2015, ternyata sebanyak 51 LHP LKPD memperoleh opini tidak wajar (TW) maupun opini tidak memberikan pendapat (TMP/*disclaimer*) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak digunakan. Perincian data selama lima tahun ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. LHP LKPD Pemda di Sumatera tahun 2011-2015 yang dianalisis

Keterangan	Tahun					Total
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Pemda Yang ada	161	161	161	164	164	811
Ketersediaan Data	161	161	161	164	164	811
Data dengan Opini Tidak Wajar	1	2	1	2	0	6
Data dengan opini <i>disclaimer</i>	13	11	8	7	6	45
Jumlah data terpakai	147	148	152	155	158	760

Sumber: LHP LKPD Pemda di Sumatera tahun 2011-2015

Dari sejumlah 760 data laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, dilakukan pemilihan akun-akun yang merupakan indikator dalam menghitung rasio keuangan pemerintah daerah.

Terdapat kemungkinan bahwa tidak setiap unsur akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai transaksi berdasar data-data yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, hal ini akan ada menyebabkan beberapa rasio yang membentuk dimensi tertentu menjadi tidak tersedia. Misalnya saja ketika sebuah pemda tidak memiliki kewajiban jangka panjang maka rasio

solvabilitas jangka panjangnya juga tidak dapat dihitung. Dalam hal rasio yang tidak tersedia tersebut maka selanjutnya dalam penghitungan, pada akun tersebut akan diberi nilai 1.

2. Statistik Deskriptif dan Analisis Rasio

Statistik deskriptif atas masing-masing rasio dimaksudkan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang akan dianalisis. Data dianggap normal apabila memiliki nilai *skewness* 0 dan *kurtosis* 3.

Ringkasan statistik deskriptif seluruh rasio dalam waktu lima tahun untuk masing-masing tingkat pemerintah daerah se-Sumatera ditunjukkan pada tabel 4.2, tabel 4.3, dan tabel 4.4.

Berdasarkan Tabel 4.2, 4.3, dan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa data rasio pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kota (pemkot), dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak terdistribusi dengan normal. Sebagai contoh pada tingkat pemkab Solvabilitas jangka pendek, untuk Rasio A memiliki nilai *skewness* 11,88 dan nilai *kurtosis* 175,85. Maka jika digambarkan dalam bentuk grafik data tersebut akan sangat runcing (karena *kurtosis*nya tinggi) dan terlalu condong ke kanan (*skewness*nya jauh dari 0). Sedangkan kurva normal seharusnya memiliki bentuk lonceng, yakni *skewness* 0 dan *kurtosis*nya 3 (Kamnikar dkk., 2006 dalam Ritonga, 2014). Dengan demikian median menjadi pilihan terbaik untuk menggambarkan data rasio secara umum

a. Solvabilitas Jangka Pendek

Nilai median untuk pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki aset

lancar sebesar 2,94; 3,5; dan 4,26 kali untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Pemerintah kota memiliki aset lancar sebesar 15,22; 19,97; dan 17,15 kali dari kewajiban jangka pendeknya, sementara pemerintah kabupaten memiliki aset lancar sebesar 20,5; 26,86; dan 23,98 kali untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya.

b. Solvabilitas Jangka Panjang

Tabel 4.7 menunjukkan nilai median setiap rasio per tingkat pemerintah dari tahun 2011-2015. Nilai median untuk pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki aset sebesar 4,945 triliun aset tetap; 43,283 aset; dan 39,98 ekuitas untuk menjamin setiap satu rupiah kewajiban jangka panjangnya. Pemerintah kota memiliki aset sebesar 970,2 milyar aset tetap; 160,91 aset; dan 149,715 ekuitas untuk menjamin setiap satu rupiah dari kewajiban jangka panjangnya, sementara pemerintah kabupaten memiliki aset sebesar 1,44 triliun aset tetap; 331,36 aset; dan 305,078 ekuitas untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya. Pada rasio A terlihat perbedaan rasio yang memiliki rentang cukup jauh dengan rasio B dan rasio C yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban jangka panjang, sehingga rasio A menyatakan jumlah seluruh Aset Tetap pemda yang berada dalam penguasaannya.

Adanya perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2015 dengan mulai berlakunya standar akuntansi berbasis akrual, maka salah satu konsekuensinya adalah disajikannya

penyusutan aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka terjadi penurunan jumlah aset yang menyebabkan pada rasio yang menunjukkan solvabilitas jangka panjang pemerintah daerah yang bersangkutan.

c. Solvabilitas Anggaran

Nilai median masing-masing pemda bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang mencukupi bagi belanja operasionalnya. Pada pemerintah provinsi diperoleh median untuk rasio A, B, C, dan D masing-masing sebesar 1,24; 1,62; 5,73; dan 1,01. Pada pemerintah kota diperoleh nilai median untuk masing-masing rasio sebesar 1,21; 1,23; 1,85; dan 1,02. Pada pemerintah kabupaten diperoleh nilai median untuk masing-masing rasio sebesar 1,23; 1,28; 1,94; dan 1,02. Secara umum total pendapatan yang dapat direalisasikan oleh pemda dari tahun ke tahun belum stabil. Hal ini diindikasikan dengan terjadinya penurunan untuk sebagian besar rasio di tahun 2013, dan rasio D di tahun 2015. Kondisi menurun menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran pada tahun tersebut cenderung kurang sehat.

d. Solvabilitas Operasional

Nilai median masing-masing pemda bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang mencukupi bagi belanja operasionalnya. Pada pemerintah provinsi diperoleh median untuk rasio A, B, C, dan D masing-masing sebesar 1,04; 1,22; 5,48; dan 1,07. Pada pemerintah kota diperoleh nilai

median untuk masing-masing rasio sebesar 1,04; 1,06; 2,00; dan 1,13. Pada pemerintah kabupaten diperoleh nilai median untuk masing-masing rasio sebesar 1,05; 1,09; 2,16; dan 1,15.

e. Fleksibilitas Keuangan

Nilai median pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Sumatera memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 3,20; 3,90; 2,69; dan 3,51 kali dalam mengantisipasi kejadian tidak terduga. Pemerintah kota di Sumatera memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 0,8; 1,75; 0,96; dan 1,89 kali dalam mengantisipasi kejadian tidak terduga.

Pemerintah kabupaten di Sumatera memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 0,91; 1,87; 1,1; dan 2,03 kali dalam mengantisipasi kejadian tidak terduga.

Rasio fleksibilitas keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera dari tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan tren. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas keuangan pemda yang semakin baik dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Namun demikian, pada level pemda kota dan pemda kabupaten perlu berhati-hati karena pada rasio A maupun rasio C menunjukkan nilai di bawah 1,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya total pendapatan setelah dikurangi DAK dan belanja pegawai ternyata belum cukup untuk menutupi total kewajiban ditambah belanja pegawai.

f. Solvabilitas Layanan

Nilai Median pada Rasio A dan B menunjukkan perbandingan nilai aset dan ekuitas pemda dengan

jumlah penduduk yang dilayani. Sementara Rasio D menunjukkan perbandingan nilai belanja pemda untuk melayani penduduknya. Pemerintah provinsi memiliki ekuitas dan aset sebesar Rp1.948.041,97 dan Rp2.013.463,36 serta membelanjakan Rp906.698,68 bagi pelayanan penduduknya. Pemerintah kota memiliki ekuitas dan aset sebesar Rp9.357.376,90 dan Rp9.399.545,99 serta membelanjakan Rp3.656.932,38 bagi pelayanan penduduknya. Pemerintah kabupaten memiliki ekuitas dan aset sebesar Rp6.616.114,76 dan Rp5.971.638,92 serta membelanjakan Rp2.950.272,76 bagi pelayanan penduduknya. Median Rasio F baru dapat dilakukan penghitungan di tahun 2015.

Nilai rasio pada masing-masing tingkatan pemda menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Kondisi tersebut mencerminkan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada warganya. Pada tahun 2011-2014 Rasio A, B, dan C menunjukkan trend meningkat, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan adanya akumulasi penyusutan aset sebagai bentuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

g. Kemandirian Keuangan

Tren kemandirian keuangan pemerintah provinsi di Sumatera menunjukkan tren yang menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan pemerintah provinsi semakin berkurang. Berdasarkan nilai median terindikasi bahwa prosentase pendapatan yang berada di bawah kendali tingkat

pemerintah provinsi adalah sebesar 39%, pada tingkat pemerintah kota adalah 9,7%, dan pada tingkat pemerintah kabupaten adalah sebesar 5%. Kecenderungan rendahnya angka rasio di tingkat pemkot dan pemkab ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera atas pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat.

3. Ilustrasi Perhitungan Indeks Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

Indeks komposit kondisi kesehatan keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumatera tahun 2011-2015 diperoleh melalui tahap-tahap penghitungan indeks kondisi keuangan (IKK). Berikut ilustrasi penghitungan rasio pada dimensi solvabilitas jangka pendek Kota Pariaman pada tahun 2015 dengan mengacu pada LHP BPK RI atas LKPD tahun 2015 Kota Pariaman.

Tahap 1: Menghitung Rasio Masing-masing Dimensi per Level Pemerintahan Daerah di Seluruh Sumatera untuk Tahun 2011-2015. Perhitungan tingkat pemerintah kota digunakan sebagai contoh penghitungan rasio.

$$\begin{aligned} \text{Diketahui Rasio A} &= (\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}) / \text{Kewajiban Lancar} \\ &= (\text{Rp}120.662.219.715,27 + 0) / \text{Rp}359.965.366,00 \\ &= 335,205 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio B} &= (\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang}) / \text{Kewajiban Lancar} \\ &= (\text{Rp}120.662.219.715,27 + 0 + \text{Rp}1.078.975.649,43) / \text{Rp}359.965.366,00 \\ &= 338,203 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio C} &= \text{Aktiva Lancar} / \text{Kewajiban Lancar} \\ &= \\ &= \text{Rp}136.348.620.790,66 / \text{Rp}359.965.366,00 \\ &= 378,783 \end{aligned}$$

Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio. Setelah diperoleh hasil atas penghitungan masing-masing rasio, maka selanjutnya ialah menghitung indeks masing-masing rasio dengan formula seperti berikut.

$$\text{IRXi} = \frac{(\text{Nilai X aktualn} - \text{Nilai X terendah})}{(\text{Nilai X tertinggi} - \text{Nilai X terendah})}$$

X = rasio yang membentuk dimensi
Misalnya, setelah diperoleh hasil rasio A pada Solvabilitas Jangka Pendek, maka didapati nilai tertinggi (maksimal) yaitu 335,205 dan nilai terendah (minimal) yaitu 0,037; sehingga indeks rasio A untuk Kota Pariaman adalah $(335,205 - 0,037) / (335,205 - 0,037) = 1,00$.

Tahap 3: Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek. Pada tahap ini dilakukan penghitungan indeks dimensi solvabilitas jangka pendek yang merupakan rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio dalam solvabilitas jangka pendek. Misalnya, indeks dimensi solvabilitas jangka pendek untuk Pemkot Sabang tahun 2015 adalah $(0,027 + 0,04 + 0,064) / 3 = 0,044$.

Tahap 4: Menghitung Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemda. Setelah masing-masing dimensi dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung indeks komposit kondisi keuangan dengan metode penggunaan bobot tertentu bagi tiap dimensi sebagaimana yang dilakukan oleh

Ritonga dkk.(2012). Adapun bobot yang diberikan pada masing-masing dimensi tidaklah sama, di mana dimensi solvabilitas jangka pendek memiliki bobot 0,206; solvabilitas anggaran 0,142; solvabilitas jangka panjang 0,245; solvabilitas layanan 0,107; fleksibilitas keuangan 0,175; dan kemandirian keuangan 0,125.

Penggunaan bobot dimensi tersebut digunakan hanya untuk menghitung Indeks Komposit Keuangan (IKK) pemda tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sedangkan untuk penghitungan IKK tahun 2015 menggunakan asumsi bahwa bobot masing-masing dimensi dianggap sama yakni sebesar 0,1428. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2015 dengan penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka dibutuhkan tambahan satu jenis dimensi. Hal ini membuat formulasi untuk penghitungan indeks komposit keuangan memerlukan dimensi solvabilitas operasional. Selanjutnya formula untuk menghitung IKK adalah sebagai berikut.

$$\text{IKK} = \sum (w_i \times \text{ID}_i); 0 < \text{IKK} < 1$$

W_i = bobot masing-masing dimensi;
ID = indeks dimensi

Contoh ilustrasi penghitungan indeks komposit keuangan pada Pemkot Pariaman tahun 2014 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{IKK} &= (0,206 \times \text{indeks solvabilitas} \\ &\quad \text{jangka pendek}) + (0,245 \times \\ &\quad \text{indeks solvabilitas jangka} \\ &\quad \text{panjang}) + (0,142 \times \text{indeks} \\ &\quad \text{solvabilitas anggaran}) + (0, \\ &\quad 175 \times \text{fleksibilitas keuangan}) \\ &\quad + (0,107 \times \text{solvabilitas} \end{aligned}$$

layanan) + (0, 125 x kemandirian keuangan).

$$IKK = (0, 206 \times 0,00004) + (0, 245 \times 0,333) + (0, 142 \times 0,200) + (0, 175 \times 0,399) + (0,107 \times 0,224) + (0,125 \times 0,175)$$

$$IKK = 0,226$$

Contoh ilustrasi penghitungan indeks komposit keuangan pada Pemkot Pariaman tahun 2015 yaitu:

$$IKK = (0,1428 \times \text{indeks solvabilitas jangka pendek}) + (0,1428 \times \text{indeks solvabilitas jangka panjang}) + (0,1428 \times \text{indeks solvabilitas anggaran}) + (0,1428 \times \text{fleksibilitas keuangan}) + (0,1428 \times \text{solvabilitas layanan}) + (0,1428 \times \text{kemandirian keuangan}) + (0,1428 \times \text{solvabilitas operasional}).$$

$$IKK = (0,1428 \times 1) + (0,1428 \times 0,035) + (0,1428 \times 0,619) + (0,1428 \times 0,343) + (0,1428 \times 0,258) + (0,1428 \times 0,021) + (0,1428 \times 0,206).$$

$$IKK = 0,354$$

Dengan demikian kita mendapatkan hasil indeks komposit kondisi keuangan Pemkot Pariaman tahun 2014 sebesar 0,226 dan pada tahun 2015 sebesar 0,597.

Tahap 5: Pemingkatan dan Pengkategorian atas Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemda. Berdasarkan IKK yang telah dihitung, maka selanjutnya dilakukan pemingkatan melalui pengkategorian hasil ke dalam tiga kriteria kondisi keuangan pemerintah daerah, yakni katagori baik, cukup, dan kurang. Tahapan ini dilakukan untuk memeringkat kondisi

keuangan setiap tahun pada masing-masing tingkat pemerintah daerah.

Kondisi keuangan pemda tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok katagori, yaitu “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”. Kondisi keuangan sebuah pemerintah daerah disebut “Baik” apabila memiliki nilai IKK lebih besar dari mean + (1 x standar deviasi). Kondisi keuangan disebut “Cukup” apabila memiliki nilai IKK antara mean + (1 x standar deviasi) dan mean - (1 x standar deviasi). Sedangkan pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan disebut “Kurang” jika memiliki nilai IKK kurang dari mean - (1 x standar deviasi).

Pada tingkat pemerintah provinsi tahun 2015, mean dari seluruh nilai IKK pemrintah provinsi di Sumatera ialah 0,470, dengan standar deviasi 0,120. Kondisi suatu pemerintah provinsi dapat dikatakan Baik jika memiliki nilai IKK lebih dari $0,470 + 0,120 = 0,590$. Kondisi keuangan pemerintah provinsi disebut Kurang Baik jika memiliki nilai IKK kurang dari $0,470 - 0,120 = 0,350$, sedangkan pemerintah kota akan termasuk dalam katagori Cukup apabila memiliki IKK antara 0,350 sampai dengan 0,590.

Pada tingkat pemerintah kota tahun 2015, mean dari seluruh nilai IKK pemrintah kota di Sumatera ialah 0,249, dengan standar deviasi 0,090. Kondisi suatu pemerintah kota dapat dikatakan Baik jika memiliki nilai IKK lebih dari $0,249 + 0,090 = 0,339$. Kondisi keuangan pemerintah kota disebut Kurang Baik jika

memiliki nilai IKK kurang dari 0,249 - 0,090 = 0,159, sedangkan pemerintah kota akan termasuk dalam katagori Cukup apabila memiliki IKK antara 0,159 sampai dengan 0,339.

Pada tingkat pemerintah kabupaten tahun 2015, mean dari seluruh nilai IKK pemerintah kabupaten di Sumatera ialah 0,210, dengan standar deviasi 0,054. Kondisi suatu pemerintah kabupaten dapat dikatakan Baik jika memiliki nilai IKK lebih dari $0,210 + 0,054 =$

0,264. Kondisi keuangan pemerintah kota disebut Kurang Baik jika memiliki nilai IKK kurang dari 0,210 - 0,054 = 0,156, sedangkan pemerintah kota akan termasuk dalam katagori Cukup apabila memiliki IKK antara 0,156 sampai dengan 0,264. Secara lebih lengkap, hasil perhitungan indeks komposit kondisi keuangan beserta pengkatagorian masing-masing tingkat pemerintah daerah di Sumatera tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Lampiran.

PMDA		Jml Penduduk (jwa)	Kepadatan Penduduk (jwa/km ²)	PDRB per kapita (Juta rupiah per jwa)	Profil umur masyarakat		UMK 2015 (Rp)	Belanja Pegawai/Total Belanja	PAD (Rp)
					Rasio Usia kerja	Rasio Bukan Usia kerja			
Tertinggi	Kab Ogan Komering Ulu	344.074	75,72	18,52	70,98%	29,02%	1.920.000,00	36,76%	38.197.172.489,75
	Kabupaten Kep Mentawai	85.303	14,19	39,68	63,45%	36,55%	1.615.000,00	26,69%	42.784.854.485,40
	Kabupaten Aceh Besar	384.620	135,00	26,83	41,52%	58,48%	1.900.000,00	47,71%	140.533.050.822,35
	Rata-rata	271.332	74,97	28,34	58,65%	43,73%	1.811.666,67	37,05%	73.838.359.265,83
Terendah	Kabupaten Rokan Hulu	592.278	77,19	45,39	66,70%	33,30%	1.925.000,00	46,75%	82.773.884.998,44
	Kabupaten Kuantan	314.276	62,13	80,16	70,76%	29,24%	1.980.000,00	50,99%	70.433.899.294,00
	Kabupaten Kep Meranti	181.095	55,11	83,62	70,89%	29,11%	1.940.000,00	29,31%	54.827.443.833,15
	Rata-rata	362.550	64,81	69,73	69,45%	31,43%	1.948.333,33	42,35%	69.345.076.041,86

Identifikasi Karakteristik Pemerintah Kabupaten di Sumatera tahun 2011-2015

Karakteristik yang akan diidentifikasi terdiri atas jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran masyarakat, profil umur masyarakat, efisiensi keuangan pemda, biaya barang dan jasa, serta pendapatan asli daerah.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bermukim di suatu wilayah menciptakan permintaan akan barang dan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah di wilayah yang bersangkutan. Semakin meningkat jumlah penduduk maka permintaan jumlah barang dan jasa akan meningkat juga (Nollenberger dkk., 2003). Ini menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah belanjanya, seperti penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lain. Kondisi ini akan memberikan tekanan bagi kondisi keuangan pemda melalui sisi pengeluaran.

Berdasarkan hasil identifikasi jumlah penduduk, pemerintah kabupaten dengan peringkat tertinggi cenderung memiliki populasi lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk di wilayah pemerintah kabupaten dengan peringkat IKK terendah.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui biaya penyediaan barang dan jasa (Nollenberger dkk., 2003 dalam Ritonga, 2014). Jika suatu pemda dengan jumlah penduduk yang tersebar di wilayah dengan luas yang lebih besar, maka biaya penyediaan barang dan jasa akan lebih tinggi untuk setiap penduduknya. Pernyataan ini sesuai

dengan hasil identifikasi perbandingan rata-rata kepadatan penduduk pada tiga pemda berperingkat tertinggi dengan tiga pemda berperingkat terendah berikut ini. Pemerintah kabupaten dengan IKK tertinggi memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi sehingga dapat meminimisasi biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

c. Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Pemerintah kabupaten dengan peringkat tertinggi cenderung menghasilkan PDRB ADHB per kapita lebih kecil dibandingkan pemerintah kabupaten dengan peringkat terendah. Sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.30 berikut. Hal tersebut selaras dengan penelitian Hou (2003) dalam Ritonga (2014) yang menemukan hubungan negatif antara pendapatan masyarakat dengan belanja pemda yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat yang tinggi akan mengurangi permintaan untuk layanan sosial.

d. Profil Umur Masyarakat

Pemerintah kabupaten dengan peringkat terendah cenderung memiliki jumlah penduduk bukan usia kerja yang lebih sedikit dibandingkan pemda dengan peringkat tertinggi. Padahal seharusnya semakin banyak jumlah penduduk usia kerja semakin banyak pendapatan pemda yang akan diperoleh melalui penerimaan pajak dan retribusi.

Sebaliknya semakin banyak jumlah penduduk kelompok bukan usia kerja (anak-anak dibawah usia 15 tahun dan lansia di atas usia 59 tahun) semakin tinggi pengeluaran pemda seperti: layanan kesehatan penyediaan fasilitas pendidikan dan jaminan sosial bagi penduduk lansia. Hal tersebut akan akan memperburuk kondisi keuangan pemda. (Jin dan Zhang, 2011 dalam Ritonga 2014). Akan tetapi setelah dicermati lebih jauh ternyata

tingkat partisipasi kerja di wilayah tersebut lebih rendah di mana dari sejumlah penduduk usia kerja di kabupaten dengan peringkat terendah tersebut bukan merupakan angkatan kerja sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerahnya juga tidak optimal.

e. Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan pemerintah daerah akan mempengaruhi kondisi keuangan melalui biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jasa dan produk (Ritonga 2014). Efisiensi keuangan dapat diukur dari belanja pegawai per total belanja. Pemerintah kabupaten yang memiliki persentase belanja pegawai yang lebih rendah memiliki indeks kondisi keuangan yang lebih tinggi. Karakteristik tersebut selaras dengan pernyataan bahwa birokrasi yang tidak efisien merupakan contributor terhadap stres keuangan pemerintah daerah (Beck, 1982 dalam Ritonga, 2014). Kondisi tersebut tercermin pada pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks kondisi keuangan yang lebih rendah mengeluarkan dana dalam porsi yang lebih besar untuk operasional pegawainya dibandingkan pemerintah daerah dengan indeks kondisi keuangan yang tinggi. Pemerintah daerah dengan indeks kondisi keuangan yang tinggi lebih efisien dalam belanja pegawai.

f. Biaya Barang dan Jasa

Dari sisi penawaran, penyediaan jasa dan produk oleh pemda ditentukan pula oleh biaya untuk memproduksi produk dan penyelenggaraan layanan tersebut. Baumol (1967) dan Bradford dkk. (1969) dalam Ritonga (2014) menyatakan bahwa upah dan gaji pegawai pemda menentukan biaya barang dan jasa. Hal ini selaras dengan hasil identifikasi

karakteristik pemerintah kabupaten dari aspek rata-rata upah minimum kabupaten berperingkat tiga tertinggi dengan pemerintah kabupaten berperingkat tiga terendah berikut.

Pemerintah kabupaten yang menetapkan upah minimum lebih tinggi memiliki nilai indeks kondisi keuangan yang lebih rendah. Tingginya upah minimum yang menyebabkan biaya produksi menjadi mahal telah memberikan tekanan bagi kondisi keuangan pemerintah kabupaten. Akibatnya jangkauan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak dapat optimal.

g. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pemerintah daerah merupakan sumberdaya mendasar yang paling mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah (Berne dan Schram, 1996 dalam Ritonga, 2014). Secara rata-rata pemerintah kabupaten yang memiliki nilai IKK tertinggi mampu merealisasikan PAD yang lebih besar. Namun jika dilihat per entitas, maka Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan dan Pemkab Kepulauan Mentawai merealisasikan nominal PAD yang lebih kecil.

Pencermatan atas realisasi ini selanjutnya memperhatikan pula aspek jumlah penduduk, bahwa kedua Pemkab tersebut walaupun menghasilkan nominal PAD yang lebih kecil, namun jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, maka akan terlihat bahwa penduduk kedua Pemkab dengan nilai IKK tertinggi tersebut berkontribusi lebih besar dalam menghasilkan PAD. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang lebih besar menunjang kondisi keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Tiga tipe pemda yang dianalisis, diperoleh deskripsi kondisi keuangan pemda tahun 2011-2015 sebagai berikut. *Pertama*, tingkat Pemerintah Provinsi. Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 beberapa pemerintah provinsi konsisten menduduki posisi tiga terbaik setiap tahunnya yakni Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Provinsi Riau. Masing-masing pemerintah provinsi ini memiliki keunggulan tersendiri pada dimensi yang berbeda. Provinsi Riau unggul dalam Solvabilitas Jangka Panjang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unggul dalam dimensi Solvabilitas Jangka pendek, sementara pemerintah Provinsi Aceh unggul dalam dimensi fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan.

Penelitian juga dapat memperlihatkan bahwa terdapat pemerintah provinsi yang masih memiliki kondisi keuangan kurang baik. Mengacu pada perolehan nilai indeks komposit keuangan yang sering berada di peringkat tiga terbawah. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah entitas yang kerap kali menempati peringkat tiga terbawah selama tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2011, 2012, dan 2013.

Kedua, Tingkat Pemerintah Kota. Nilai IKK tertinggi selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2011-2014 diperoleh Pemkot Sabang. Sedangkan Pemkot Bengkulu belum konsisten dalam memperbaiki kondisi keuangan pemdanya. Terlihat ketika pada tahun 2012-2014 Pemkot Bengkulu memperoleh peringkat tiga terbawah dengan katagori 'Kurang' meskipun kondisi keuangannya sempat membaik pada periode 2013-2014.

Selama tahun 2011-2015 pemkot yang menempati peringkat tiga tertinggi memiliki kondisi keuangan pemda yang baik/ sehat. Sementara pemkot yang memperoleh peringkat tiga terendah masih berada dalam kondisi keuangan yang 'Kurang'. Pada tahun 2015, Pemkot Padang Sidempuan, Pemkot Bengkulu dan Pemkot Tanjung Pinang masih termasuk dalam kategori kurang sehat.

Ketiga, Tingkat Pemerintah Kabupaten. Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 pemda kabupaten yang konsisten memperoleh nilai tiga peringkat tertinggi pada nilai IKK yaitu Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan Pemkab Simalungun adalah pemda yang tercatat berada di posisi terendah di antara pemkab yang lain selama periode 2011 dan 2014. Skor IKK pemkab Simalungun rendah akibat rendahnya dimensi fleksibilitas keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun pada periode tersebut. Dimensi inilah yang perlu mendapat perhatian pemkab tersebut.

Analisis dalam penelitian juga dikaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran produk maupun layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Analisis ini mengkaitkan beberapa karakteristik masing-masing daerah yang mempengaruhi kondisi keuangan pemda.

Melalui hasil analisis karakteristik masing-masing daerah dapat disimpulkan bahwa:

- a. pemerintah daerah dengan populasi penduduk yang lebih banyak cenderung mengalami kondisi keuangan yang lebih buruk dari sisi penawaran dan sisi permintaan layanan yang disediakan oleh pemda;
- b. kepadatan penduduk yang lebih tinggi meningkatkan tingkat efisiensi keuangan yang tinggi, sebagaimana kondisi yang terjadi di kabupaten

- yang memiliki nilai indeks kondisi keuangan berperingkat tiga tertinggi. Kepadatan penduduk yang lebih tinggi mampu meminimalisasi biaya/ongkos produksi barang dan jasa sehingga mendukung kondisi keuangan yang lebih baik dari sisi penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemda;
- c. pemda dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi memiliki kondisi keuangan yang kurang baik karena penduduk yang lebih makmur menuntut belanja publik yang lebih kompleks sehingga memberikan tekanan bagi keuangan pemda dari sisi permintaan atas barang dan jasa yang harus disediakan oleh pemda,
 - d. pemda dengan profil persentase kelompok usia kerja yang lebih banyak cenderung memiliki nilai kondisi keuangan yang rendah karena belum diimbangi dengan tingkat partisipasi kerja yang optimal sehingga tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah.
 - e. Pemerintah kabupaten yang menetapkan upah minimum lebih tinggi memiliki nilai indeks kondisi keuangan yang lebih rendah. Tingginya upah minimum yang menyebabkan biaya produksi menjadi mahal telah memberikan tekanan bagi kondisi keuangan pemerintah kabupaten. Akibatnya jangkauan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak dapat optimal.
 - f. penduduk di pemkab dengan nilai IKK tertinggi berkontribusi lebih besar dalam menghasilkan PAD. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang lebih besar menunjang kondisi keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi saran bagi penelitian berikutnya sebagai berikut.

1. Total daerah otonom di Indonesia terdiri dari 542 pemda yang terdiri atas 34 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota (Ditjen Otda 2014). Penelitian atas pemerintah daerah di Sumatera ini mencakup 30,3% dari total pemerintah daerah otonom yang ada di Indonesia, sehingga dalam zonasi dapat dianggap terlalu luas. Oleh karena itu agar memperoleh hasil yang akurat dan dapat diperbandingkan maka pengukuran perlu dibagi menjadi zonasi area Sumatera bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan, supaya saat dianalisis dapat mencerminkan kondisi yang lebih riil.
2. Penggunaan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) hanya dapat digunakan dalam penghitungan rasio yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2011-2015. Sedangkan pada tahun 2015 terkait dengan Laporan Operasional (perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual) terdapat satu tambahan dimensi Solvabilitas Operasional. Di sini penghitungan indeks kondisi keuangan (IKK) pemda tahun 2015 tidak dapat lagi menggunakan pembobotan dimensi sebagaimana dalam model Ritonga (2014). Dalam hal ini masing-masing dimensi diasumsikan memiliki bobot yang sama sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pembobotan dimensi yang mampu merepresentasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. Validasi eksternal penelitian ini masih terbatas pada validasi *peer debriefing* yang dikhususkan pada dosen pembimbing serta mahasiswa magister akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik khususnya dengan topik penelitian pada ranah serupa. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu untuk melakukan validasi ahli. Pada penelitian selanjutnya disarankan dapat memperkuat validitas penelitian dengan mengadakan *focus group discussion* (FGD) dan validasi pihak-pihak yang berkepentingan seperti: Kementerian Dalam Negeri DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) dan Pemerintah Daerah.
 4. Penghitungan rasio menggunakan data riil dari LKPD sehingga pada nilai rasio solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang didapati nilai yang ekstrim. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya perlu dilakukan transformasi data misalnya dalam bentuk logaritma.
- Transformasi data tidak akan mengubah proses analisis data.
5. Saran bagi pemda yang berperingkat rendah
 - a. Memacu peningkatan PAD dengan melakukan inovasi penyediaan barang dan jasa sesuai dengan potensi daerah yang tersedia.
 - b. Mengevaluasi belanja wajib pemerintah, sehingga menjadi lebih efisien
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset lancar dengan melakukan manajemen aset yang lebih baik agar dapat mengurangi aset lancar yang menganggur.
 - d. Mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia terutama penduduk usia produktif yang tidak masuk sebagai angkatan kerja melalui program-program yang bersifat padat karya.***

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. Diakses dari https://www.bpk.go.id/assets/files/ihips/2016/I/ihips_i_2016_1475566035.pdf tanggal 17 Maret 2017
- Badan Pusat Statistik.2016. *Provinsi Aceh dalam Angka 2016*. Diakses dari https://aceh.bps.go.id/asem/pdf_publicasi/Provinsi-Aceh-Dalam-Angka-2016--.pdf tanggal 13 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik.2016. *Provinsi Lampung dalam Angka 2016*. Diakses dari <http://lampungprov.go.id/page/detail/lampung-dalam-angka.html> tanggal 13 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik.2016. *Provinsi Riau dalam Angka 2016*. Diakses dari https://riau.bps.go.id/websiteV2/pdf_publicasi/Provinsi-Riau-Dalam-Angka-2016.pdf tanggal 13 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik.2016. *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2016*. Diakses dari https://sumbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Sumatera-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf tanggal 13 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik.2016. *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2016*. Diakses dari https://sumsel.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf tanggal 13 Juli 2017

- publikasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf tanggal 13 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2016*. Diakses dari https://sumut.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Provinsi-Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2016.pdf tanggal 13 Juli 2017
- Brown, K.W. 1993. The 10-point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities. *Government Finance Review*. Vol. 9, No. 6, pp. 21-26.
- Carmeli, A. 2008. "The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies." *Administration & Society*, Vol 39, No 8, pp 984- 1007.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. California: Sage Publications, Inc.
- CICA. 1997. *Indicators of Government Financial Condition*. Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants.
- Cooper, D.R., dan P.S. Schindler. 2011. *Business Research Methode*, New York: The McGraw-hill/Irwin Burr Ridge. Adobe PDF eBook.
- Crosby, A. dan D. Robbins. 2013, Mission Impossible: Monitoring Municipal Fiscal Sustainability and Stress in Michigan. *J.of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*. Vol.23, No.3, pp. 522-555.
- Deliarnov 2007, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Dewi, A.P. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown. *Skripsi*. Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- DJPK. 2012. Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Honadle, BW, Costa, JM, dan Cigler, BA. 2004. *Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concept, Practical, Analysis, and Strategies*, Boston: Academic Press/Elsevier.
- Hyman, D.N. 2010. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. 10th Edition. South-Western Publication, USA.
- Kloha, P., C.S. Weissert, dan R. Kleine. 2005. Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*. Vol. 65, No. 3, pp. 313-323.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maher, C.S. dan Nollenberger, K. 2009. Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test" *Government Finance Review*, Vol 25, No 5, pp 61-66.
- Natrini, N.D. 2016. Desain dan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali Tahun 2013 dan 2014. *Tesis*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nollenberger, K., M.S. Groves, dan M.G. Valente. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*. International

- City/County Management Association. Washington, DC.
- Ohls, J.C. dan T.J. Wales. 1972. "Supply and demand for state and local services. *The Review of Economics and Statistics*, Vol 54, No 4, pp 424-430.
- Ramsey, T.K. 2013. Measuring and Evaluating the Financial Condition of Local Government. *Thesis*. Department of Public Policy and Administration California State University, Sacramento, USA.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 224. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ritonga, I.T. 2014. Modelling Local Government Financial Conditions In Indonesia. *Ph.D. Dissertation*. Victoria University. Melbourne, Australia.
- Ritonga, I.T., C. Clark, dan G. Wickremashinghe. 2012. Developing a Measure of Local Government Financial Condition. *The 13th International Annual Conference Asian Academic Accounting Association*. Kyoto, Japan, 9-12 November 2012. 2012b.
- Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Municipal and Public Finance*. Vol. 1, No. 2, pp. 37-50. 2013.
- Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *The 7th Asia Pacific Interdisciplinary Research Accounting (APIRA)*. Kobe University, Jepang, 26-28 Juli 2013.
- Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Cetakan I. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah dan Pustaka Pelajar.
- Rivenbark, W.C., D.J. Roenigk, dan G.S. Allison. 2009. Communicating Financial Condition to Elected Officials in Local Government. *Popular Government*. Vol. 77, No. 1, pp. 4-13. 2010.
- Conceptualizing Financial Condition in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 22, No. 2, pp. 149-177.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research methods for business: a skill-building approach*. 6th Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. Adobe PDF eBook.
- Wang, X., L. Dennis, dan Y.S.J. Tu. 2007. Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. *Public Budgeting & Finance*. Vol. 27, No. 2, pp. 1-21.